BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2016 sebagai berikut:

 Pengaruh UMK terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil output diperoleh nilai probabilitas untuk variabel UMK sebesar (0.0000) dengan tingkat signifikansi (0.05) maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Karena nilai probabilitas < tingkat signifikansi 5% (0.05), artinya bahwa UMK berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Di lihat dari nilai konstanta koefisien regresi nilai UMK sebesar -0.068751 yang berarti bahwa setiap kenaikan UMK sebesar satu satuan kali maka akan

menyebabkan penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebesar -0.068751 bila variabel lain konstan.

 Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil output diperoleh nilai probabilitas untuk variabel Inflasi sebesar (0.0000) dengan tingkat signifikansi (0.05) maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Karena nilai probabilitas < tingkat signifikansi 5% (0.05), artinya bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Dilihat dari nilai konstanta koefisien regresi nilai Inflasi sebesar 0.150037 yang berarti bahwa setiap kenaikan Inflasi sebesar satu satuan kali maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebesar 0.150037 bila variabel lain konstan.

 Pengaruh UMK dan Inflasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Dari hasil output pengaruh UMK dan Inflasi secara simultan terhadap kemiskinan diperoleh nilai probabilitas sebesar (0.0000) dengan tingkat signifikansi sebesar (0.05) maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, karena nilai

probabilitas < tingkat signifikansi 0.05 (5%). Artinya secara simultan atau bersamaan UMK dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

B. Saran

Kepada pemerintah diharapkan untuk selalu meninjau dan memperhatiakan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menjaga stabilitas perekonomian terutama dalam aspek inflasi dan dalam menetapkan tingkat upah minimum, yakni dengan melihat tingkat kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga perekonomian di Provinsi Banten tetap meningkat dengan baik.